

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita : Kabupaten Sragen

Halaman 9

## Dua Mobdin Baru Telan Rp1,1 M

### Untuk Bupati dan Wakil Bupati

**SRAGEN** - Pemkab Sragen membeli dua mobil mewah untuk kendaraan operasional bupati dan wakil bupati dengan anggaran Rp 1,1 miliar. Pengadaan mobil dinas itu, diantaranya jenis Toyota Fortuner seharga Rp 520 juta dan Toyota Innova Venturer Rp 480 juta.

Kedua kendaraan itu untuk menggantikan mobil dinas bupati Toyota Camry dan kendaraan operasional Wabub Honda CRV.

Informasi yang dihimpun, bupati sendiri dinilai lebih memilih mobil jenis Innova Venturer, sedangkan untuk Fortuner mobil operasional wabub.

Sekda Sragen Tatag Prabawanto mengatakan, kebutuhan kendaraan operasional

bupati dan wabub dinilai memang sangat perlu untuk mendukung kinerja pimpinan daerah secara optimal. Selain itu, kendaraan baru juga untuk safety keselamatan bagi bupati dan wabub.

"Karena kendaraan operasional bupati jenis Toyota Camry memang sudah sejak tahun 2007. Begitu juga untuk Innova yang lama sudah lima tahun digunakan. Sehingga untuk menunjang tugas se-

hari-hari dilakukan pembelian dua mobil dinas baru. Sesuai dengan urgensi, usia mobil

sudah lebih dari 5 tahun, sehingga kendaraan perlu ganti," papar Tatag, Rabu (14/3).

Dikatakan Tatag, pengadaan kendaraan dinas baru bagi bupati dan wabub itu

juga sudah ada persetujuan dari pihak DPRD. Sedangkan teknis pengadaan mobil dinas

tersebut dilakukan secara lelang terbuka.

Kendaraan yang sudah tidak digunakan tetap akan dioperasikan sesuai kebutuhan. Sekda menyampaikan kendaraan yang lama akan dikelola bagian umum. "Tidak dilelang, nanti kalau ada tamu yang berkunjung bisa dimanfaatkan," tandasnya.

Tatag menekankan untuk tidak mengkaitkan dengan kondisi yang sifatnya seolah-olah berbanding terbalik dengan kondisi kebutuhan biaya lain-lain. Kendaraan yang menunjang kinerja bupati juga harus difasilitasi.

"Soal pembagian penggunaan mobil dinas baru itu, sepenuhnya diserahkan ke bupati maupun wabub," tutur Tatag.

Terkait kendaraan Dinas yang lain masih ditunda saat ini. Termasuk kebutuhan kendaraan, kepala dinas sekitar tujuh OPD baru. Pihaknya menyampaikan kendaraan operasional saat ini masih bisa dioptimalkan. Selain itu usia kendaraan dinas masih belum habis. (ars/saf)